

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik simpulan bahwa:

1. Penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato berada pada kriteria yang baik yang berarti bahwa sekolah menerapkan prinsip transparansi dalam menciptakan tata kelola sekolah yang baik dalam aspek keuangan maupun administratif.
2. Penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato berada pada kriteria baik yang berarti bahwa sekolah menerapkan prinsip partisipatif dengan efektif dengan aktif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak seperti komite sekolah, stakeholder kependidikan dan masyarakat.
3. Penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato berada pada kriteria baik yang berarti bahwa akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal dilakukan dengan baik oleh sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menciptakan *Good School Governance* dalam organisasi sektor publik kependidikan.
4. Penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato berada pada kriteria baik yang berarti bahwa adanya efektivitas kemandirian dari warga sekolah dalam pengelolaan keuangan, pembelajaran dan administrasi sekolah. Kemandirian sekolah sebagai suatu upaya otonomi bagi sekolah agar seluruh kegiatan dan operasional sekolah menjadi tanggung

jawab sekolah tersebut dalam menciptakan Good Governance dalam lingkungan sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sehubungan dengan hasil penelitian ini penulis mengajukan beberapa saran yakni

1. Prinsip transparansi perlu dioptimalkan dengan melibatkan semua guru dan berbagai elemen terkait dalam melakukan perencanaan agar tidak terjadi asimetri informasi yang diterima oleh kepala sekolah sehingga perencanaan yang dilakukan kurang optimal atau dalam hal ini kepala sekolah akan mengambil langkah konseptual dan pengembangan sekolah yang kurang tepat. Selain itu perlunya kepala sekolah melakukan monitoring rutin untuk mengumpulkan berbagai informasi dalam menunjang kemampuan konseptual dalam merencanakan pengembangan sekolah yang lebih baik.
2. Perlu adanya upaya konkrit dalam peningkatan prinsip partisipatif yakni dengan melakukan kerja sama bukan hanya dengan masyarakat, stakeholder pendidikan dan warga sekolah namun juga memanfaatkan alumni dari sekolah tersebut minimal setahun sekali untuk saling koordinasi dan tukar pikiran mengenai pengembangan sekolah yang lebih baik. Kemudian juga melibatkan pihak swasta seperti mengajukan berbagai hal yang positif kepada swasta yang melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* agar supaya siswa-siswa yang kurang mampu dan kategori lainnya dapat terbantu.
3. Upaya akuntabilitas berbagai kegiatan sekolah perlu ditingkatkan dengan membuat sebuah sistem yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo dengan sekolah-

sekolah Menengah Atas agar sistem dan aplikasi ini menjadi sebuah kontrol untuk menilai akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja guru dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. Pentingnya bagi Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo untuk melakukan upaya peningkatan kompetensi dan komitmen dari guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya dalam upaya untuk meningkatkan capaian penerapan prinsip-prinsip *Good School Governance* dalam organisasi sektor publik di Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Adelia, R. (2015). Pengaruh peran auditor internal, sistem pengendalian Intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut Temuan audit terhadap penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik (good government governance) (Studi Empiris Pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal di Kementerian Republik Indonesia). *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Ahmadjayadi, C. (2010). Standarisasi Menuju Interoperabilitas e-government. Makalah keynote speech pada Workshop Standarisasi Menuju Interoperabilitas e-government, Jakarta.
- Arwildayanto; Lamatenggo, N; dan Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Jawa Barat: Widya Padjadjaran
- Astuti, D. (2012). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Bakri, A. T. R. L. P. (2015). Peran kepemimpinan dan manajemen berbasis Sekolah terhadap kinerja guru dan pengawas Sekolah menengah di kabupaten aceh tengah. *Jurnal Manajemen* ISSN 2302-0199 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Bryan dan White. (1987). *Managemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Jakarta: LP3S
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dasor, Y. W. (2018). Implementasi Good Governance Dalam Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 137-273
- Fadil, F. (2013). “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah”. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2).
- Gie, The Liang. (2002). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty. Yogyakarta
- Haris, I. (2016). *Indeks Kinerja Sekolah: Konsep dan Aplikasi Pengukuran Kemandirian Mutu dan Inovasi Pengelolaan Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

- Harsowasono, R. (2010). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pendidikan Sekolah Dasar : Studi kasus di Empat Sekolah Dasar oleh pemerintah Kabupaten Sleman. *Tesis*. Universitas Diponegoro
- Herawan, D. (2018). *Implementasi Good Governance Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada SMP Negeri 1 Lembang*. *Jurnal Pendidikan*. UPI-Bandung
- Hermawan, C. (2003). *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Kompas
- Iflaha, N. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Kurikulum. *Jurnal Al-Yasini Volume 4 Nomor 1*.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Kumorotomo, W. (2013). *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kusmayadi, Di; Dedi R, dan Jajang B. (2017). Pemodelan Tata Kelola Sekolah Yang Baik Pasca Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Universitas Siliwangi*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Manan, A. (2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Mardiasmo, (2011) *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mas, Sitti Roskina. (2011). Partisipasi Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal el-Hikmah* Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
- Mulyasa. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Purnama, F dan Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1). No. (2). Halaman 01-15
- Purnamasari, I. (2008). Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang :UMM Press.

- Rahman, B; Abdurrahman; dan Riswandi. (2016). Model Good Governance Sekolah Dasar (SD) Melalui Penguatan Peran Komite Sekolah Di Kota Metro. *Jurnal Pendidikan Dasar*. Universitas Diponegoro
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rewansyah, A. (2011). *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA-LAN Jakarta.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rintiani, A. (2011). Pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelompok Bisnis Dan Manajemen Se-Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*
- Budiman, A. (2016). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ruliaty. (2011). Strategi Mewujudkan Good Governance Melalui Transparansi Pelayanan Publik. *AL-FIKR: Vol 15, No. 3:553-563*
- Salusu, J. (2016). *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sedarmayanti. (2009) *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: Mandar Maju.
- Setiyono, B. (2014). *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Buku Seru.
- Soetrisno, L. (1995) *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujata, A.. (2006). *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Gramedia
- Sumarsono, H. (2003). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1). No 1*
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

- Tajuddin. (2008). Good Governance (Konsep dan Implementasi di Kabupaten Bangka). www.bangka.co.id diakses pada 5 Agustus 2020
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Wahab, S. (2002). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: Elsam dan Huma